

2025



PEMERINTAH K
DINAS KESEHATAN

RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2025



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunianya sehingga Dokumen Rencana Kerja Perubahan (RENJA) Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2025 dapat diselesaikan dengan baik.

Penyusunan Renja merupakan amanat Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dimana setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan.

Renja Perubahan Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2025 merupakan Renja tahun pertama periode pelaksanaan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju dan RPMJD tahun 2025-2029 pada akhir pelaksanaan Renja ini nantinya akan menjadi bahan untuk mengevaluasi sejauh mana capaian tujuan dan sasaran Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju sesuai indikator yang telah ditetapkan dalam renstra Dinas Kesehatan Kabupten Mamuju Tahun 2025-2029.

Kami menyadari bahwa dalam pelaksanaan Renja Perubahan Tahun 2025 ini nantinya akan banyak dijumpai kendala dan hambatan, untuk itu komitmen dari semua pihak sangat diharapkan dan kami terbuka untuk saran dan perbaikan, sehingga pembangunan kesehatan yang kami rencanakan betul – betul dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Kabupaten Mamuju.

Mamuju, 07 Juli 2025

Kepala Dinas

Kesehatan Kabupaten Mamuju,

dr. SITA HARIT IBRAHIM, Sp.PD
NIP 196809122002121008

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... i

DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang..... 1

1.2. Landasan Hukum 2

1.3. Maksud dan Tujuan..... 4

1.4. Sistematika Penulisan 5

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU.....

2.1. Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian
Renstra Perangkat Daerah 11

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 34

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat
Daerah..... 54

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD..... 55

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat..... 100

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH..... 102

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.....102

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah..... 109

3.3. Program dan Kegiatan..... 110

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....111

BAB V P E N U T U P..... 148

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan Perangkat Daerah untuk menyusun Renja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun yang merupakan terjemahan dari perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Kerja Perubahan Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju Tahun 2025 disusun sebagai dokumen perencanaan yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang berdasarkan pada permasalahan dan isu strategis, data capaian kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju Tahun sebelumnya serta berorientasi pada capaian target indikator kinerja selama kurun waktu 1 (satu) tahun.

Penyusunan Renja Perubahan Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju Tahun 2025 dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan sesuai tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah yang tertuang di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan tahapan:

- a. persiapan penyusunan;
- b. penyusunan rancangan awal;
- c. penyusunan rancangan
- d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
- e. perumusan rancangan akhir; dan
- f. penetapan.

Renja Perubahan Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju Tahun 2025 merupakan tahun pertama dari pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju Tahun 2025-2029. Penyusunan Renja Perubahan Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju Tahun 2025 dilaksanakan

dengan memperhatikan hasil evaluasi target dan capaian pembangunan tahun 2024 sehingga seluruh kebijakan, strategi dan program dan kegiatan pembangunan bidang kesehatan tahun 2025 difokuskan pada pencapaian indikator kinerja utama Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju dan persiapan menuju era transformasi pelayanan kesehatan.

Penyusunan Renja Perubahan Dinas Kesehatan Kab. Mamuju merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD. Rencana Kerja Perangkat Daerah menjadi penghubung antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kab. Mamuju juga memuat usulan dari Hasil Musrenbang di tingkat Kecamatan dengan memperhatikan Sistem Kesehatan Nasional dan digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA). Program dan kegiatan yang memuat indikator, tolak ukur dan target kinerja mengacu pada Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas & Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS). Selanjutnya dipergunakan sebagai bahan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Selain itu, Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju tahun 2025 juga mengacu pada renstra Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat dan Renstra Kementerian Kesehatan serta rencana kerja Kementerian Kesehatan.

Diharapkan Rancangan Renja yang akan disempurnakan setelah penyelenggaraan Forum Perangkat Daerah akan menjadi bahan penyusunan dan penyempurnaan RKPD Tahun 2025.

1.2 Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju tahun 2025 mengacu kepada landasan hukum sebagai berikut;

1. UU No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
2. UU No 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
3. UU No. 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan
4. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
7. Peraturan Pemerintah No 45 Tahun 2017 Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

-
8. Peraturan Pemerintah No 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 10. Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020 tentang RPJM Nasional Tahun 2020-2024;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
 16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900 Tahun 2023 tentang hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
 17. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 5 Tahun 2010 tentang RPJPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2005-2025 Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2014 tentang RT RW Provinsi Sulawesi Barat;
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 1 Tahun 2016 tentang pokok pengelolaan keuangan Daerah
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Mamuju Tahun 2005-2025
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 10 Tahun 2019 tentang RT RW Kabupaten Mamuju Tahun 2019-2039
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 - 2026
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 11 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mamuju Tahun

-
- Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2023 Nomor 11)
24. Peraturan Bupati Mamuju Nomor 81 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2024 Nomor 8);
 26. Peraturan Bupati Mamuju Nomor 34 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2024, Nomor 34).

1.3 Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju Tahun 2025 adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan Dinas Kesehatan sehingga terlaksananya program pembangunan kesehatan yang efektif dan efisien sesuai dengan tujuan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju dan tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mamuju Tahun 2025-2029.

b. Tujuan

Untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di Kabupaten Mamuju, maka tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju yaitu:

- Sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKA-P) Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju Tahun 2025
- Menjadi alat ukur kinerja dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi di Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju
- Sebagai Penjabaran Renstra OPD Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju tahun 2025-2029 yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Mamuju Tahun 2025- 2029.
- Memberikan gambaran tentang program dan kegiatan yang akan dikerjakan tahun 2025
- Menjawab pertanyaan apa yang menjadi tujuan, sasaran peningkatan pelayanan, target capaian kinerja serta bagaimana pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan OPD sesuai Tupoksinya.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan kabupaten Mamuju Tahun 2025, disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Memuat tentang Rencana Kerja (Renja) Perubahan OPD, Proses Penyusunan renja OPD, keterkaitan antar Rencana Kerja (Renja) OPD dengan Dokumen RKPD, Renstra OPD dengan Renja.

1.2 Landasan Hukum

Mengurai apa yang menjadi landasan hukum didalam penyusunan Rencana Kesehatan (Renja) Perubahan Tahun 2025.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat Penjelasan Tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan OPD.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD, serta susunan garis besar isi Dokumen.

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

Menggambarkan kajian (review) terhadap hasil evaluasi Renja SKPD Tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan.

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Menjelaskan yang Menyangkut arah dan kebijakan prioritas Pembangunan Nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi OPD.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Menjelaskan mengenai tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD.

3.3. Program dan Kegiatan

Menjelaskan faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap perumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Menjelaskan tentang nama program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 berdasarkan tugas pokok dan fungsi masing-masing pelaksana program di OPD Dinas Kesehatan.

BAB V PENUTUP

Menjelaskan catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaannya, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan Organisasi Pemerintah Daerah (DPPA-OPD) Tahun 2024 dengan total alokasi Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju sebesar Rp 181.547.221.320 yang terealisasi sebesar Rp. 168.912.351.603 atau sebesar 93,04% dari Total Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2024 yang terdiri dari:

a. Belanja Operasi

Total Anggaran Belanja Operasi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 166.160.189.989 yang terealisasi sebesar Rp. 154.638.855.854 atau sebesar 93,06%. Belanja Operasi ini dengan kontribusi sebesar 84,64% dari keseluruhan belanja Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju, yang dituangkan dalam kegiatan :

- Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
- Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi
- Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota
- Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
- Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
- Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga
- Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

b. Belanja Modal

Total Anggaran Belanja Modal pada Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 16.544.889.068 yang terealisasi sebesar Rp. 14.273.495.749 atau sebesar 86,27%. Belanja Modal ini dengan kontribusi sebesar 7,81% dari keseluruhan belanja Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju, yang terdapat dalam kegiatan :

- Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota pada sub kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas, Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan, dan Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan

2.1.1 Realisasi program dan kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan Pada Tahun 2024 dari 5 (Lima) program 18 Kegiatan dan 72 Sub Kegiatan terdapat 1 sub kegiatan yang tidak terlaksana/terrealisasi yaitu :

- a. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota sub kegiatan Pembangunan Puskesmas hanya terlaksana Perencanaannya di karenakan pagunya baru diusulkan di perubahan sehingga untuk bangunannya tidak memungkinkan untuk dilaksanakan.
2. Realisasi program dan kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
- Keseluruhan Program dan kegiatan di bawah ini sudah sesuai dengan APBD tahun berjalan pada saat penyusunan Renja disahkan.
- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan rincian kegiatan :

-
- 1) Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan indikator Persentase Ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah target 100% Capaian 100%. Di tahun 2024 anggaran Renja dengan APBD sudah sesuai 100% dan di proyeksikan dapat terlaksanakan sesuai taget dengan persen terhadap anggaran program sebesar 0,081%.
 - 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan Indikator Persentase dokumen administrasi Keuangan Perangkat Daerah target 100% Capaian 100%. Di tahun 2024 anggaran Renja dengan APBD sudah sesuai 100% dan di proyeksikan dapat terlaksanakan sesuai taget dengan persen terhadap anggaran program sebesar 95,18%.
 - 3) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dengan indikator Persentase dokumen administrasi Pengadaan barang milik daerah target 100% Capaian 100%. Di tahun 2024 anggaran Renja dengan APBD sudah sesuai 100% dan di proyeksikan dapat terlaksanakan sesuai taget dengan persen terhadap anggaran program sebesar 0,018%.
 - 4) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan indikator Persentase Ketersediaan Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Berkualitas target 100% Capaian 100%. Di tahun 2024 anggaran Renja dengan APBD sudah sesuai 100% dan di proyeksikan dapat terlaksanakan sesuai taget dengan persen terhadap anggaran program sebesar 0,047%.
 - 5) Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan indikator kinerja Persentase Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah target 100% Capaian 100%. Di tahun 2024 anggaran Renja dengan APBD sudah sesuai 100% dan di proyeksikan dapat terlaksanakan sesuai target dengan persen terhadap anggaran program sebesar 0,35%.
 - 6) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan indikator kinerja Persentase Ketercukupan Sarana dan Prasarana Aparatur target 100% capaian 100%. Di tahun 2024 anggaran Renja dengan APBD sudah sesuai 100% dan di proyeksikan dapat terlaksanakan sesuai target dengan persen terhadap anggaran program sebesar 3,47%.
 - 7) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan indikator kinerja Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang

-
- Urusan Pemerintah Daerah target 100% capaian 100%. Di tahun 2024 anggaran Renja dengan APBD sudah sesuai 100% dan di proyeksikan dapat terlaksanakan sesuai taget dengan persen terhadap anggaran program sebesar 0,65%.
- 8) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan indikator kinerja Persentase barang milik Daerah yang dipelihara target 100% capaian 100%. Di tahun 2024 anggaran Renja dengan APBD sudah sesuai 100% dan di proyeksikan dapat terlaksanakan sesuai taget dengan persen terhadap anggaran program sebesar 3,47%.
- b. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat dengan rincian kegiatan kegiatan
- 1) Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator kinerja Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota target 100% Capaian 86,96%. Di tahun 2024 anggaran Renja dengan APBD sudah sesuai 100% dan di proyeksikan dapat terlaksanakan sesuai taget dengan persen terhadap anggaran program sebesar 14,79%.
 - 2) Penyediaan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator kinerja Persentase Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota target 100% Capaian 90,34%. Di tahun 2024 anggaran Renja dengan APBD sudah sesuai 100% dan di proyeksikan dapat terlaksanakan sesuai taget dengan persen terhadap anggaran program sebesar 84,95%
 - 3) Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan dengan indikator kinerja Pesentase FASYANKES yang menggunakan Sistem Informasi Puskesmas (SIMPUS) target 100% Capaian 81,59%. Di tahun 2024 anggaran Renja dengan APBD sudah sesuai 100% dan di proyeksikan dapat terlaksanakan sesuai taget dengan persen terhadap anggaran program sebesar 0,26%
- c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan dengan rincian kegiatan :
1. Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota dengan indikator Persentase Puskesmas yang memiliki standar tenaga minimal target 100 % Capaian 97,72%. Di tahun 2024 anggaran Renja dengan APBD sudah sesuai 100%

-
- dan di proyeksikan dapat terlaksanakan sesuai taget dengan persen terhadap anggaran program sebesar 57,43%
2. Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator kinerja Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) yang Ditingkatkan Kompetensinya target 100% Capaian 92,24%. Di tahun 2024 anggaran Renja dengan APBD sudah sesuai 100% dan di proyeksikan dapat terlaksanakan sesuai taget dengan persen terhadap anggaran program sebesar 74,14%
- d. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman dengan rincian kegiatan :
1. Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) dengan indikator Persentase Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang memiliki Izin, target 100% Capaian 99,76%. Di tahun 2024 anggaran Renja dengan APBD sudah sesuai 100% dan di proyeksikan dapat terlaksanakan sesuai taget dengan persen terhadap anggaran program sebesar 13,22%
 2. Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga dengan indikator Persentase Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga target 100% Capaian 99,46%. Di tahun 2024 anggaran Renja dengan APBD sudah sesuai 100% dan di proyeksikan dapat terlaksanakan sesuai taget dengan persen terhadap anggaran program sebesar 60%
 3. Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga dengan Persentase pemeriksaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan pos market pada produksi dan produk makanan minuman industri rumah tangga target 100% Capaian 91,51%. Di tahun 2024 anggaran Renja dengan APBD sudah sesuai 100% dan di proyeksikan dapat terlaksanakan sesuai taget dengan persen terhadap anggaran program sebesar 26,78%

e. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan dengan rincian kegiatan :

1. Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator kinerja Persentase Persentase Desa yang Melaksanakan GERMAS (ASEK) target 100% Capaian 99,58%. Di tahun 2024 anggaran Renja dengan APBD sudah sesuai 100% dan di proyeksikan dapat terlaksana sesuai target dengan persen terhadap anggaran program sebesar 22%
2. Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator Persentase Posyandu Yang melaksanakan ILP 40% Capaian 40%. Di tahun 2024 anggaran Renja dengan APBD sudah sesuai 100% dan di proyeksikan dapat terlaksanaan sesuai target dengan persen terhadap anggaran program sebesar 78%
3. Realisasi program dan kegiatan yang melebihi target kinerja.

Pada tahun 2024 tidak terdapat realisasi program dan kegiatan yang melebihi target kinerja yang direncanakan.
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program dan kegiatan

Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program dan kegiatan pada tahun 2024 adanya sub kegiatan yang tidak terealisasi disebabkan adanya kendala pada pendukung sub kegiatan tersebut sehingga tidak dapat dilaksanakan karena :

 - a. Pelaksanaan kegiatan dengan sub kegiatan dan indikator kinerja perlu penyesuaian target akibat adanya efisiensi dan refocusing anggaran berdampak pada keterhambatan pencapaian target.
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah

Implikasi yang timbul akibat tidak tercapainya target kinerja program dan kegiatan terhadap target capaian program renstra Dinas Kesehatan adalah bahwa merencanakan target untuk tahun berikutnya harus melihat hasil evaluasi kinerja pelaksanaan Renja tahun sebelumnya. Apabila pelaksanaan Renja OPD tahun lalu mempunyai kinerja kurang baik, maka untuk menetapkan target kinerja di tahun berikutnya memiliki peluang untuk diturunkan menjadi lebih rendah atau sama dengan tahun sebelumnya.

Selain itu apabila pelaksanaan Renja tahun lalu tidak mencapai target, akan membebani pelaksanaan program dan kegiatan tahun berjalan dan akan memungkinkan target Renstra tidak tercapai di akhir periode.

Beberapa implikasi yang timbul terhadap capaian program Renstra Dinas Kesehatan adalah antara lain adalah :

- a. Meningkatnya Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) dan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) di kabupaten/kota. Hal ini ditandai dengan semakin meningkatnya persentase masyarakat yang melakukan persalinan di fasilitas Kesehatan, pelaksanaan SPM di Puskesmas, peningkatan persentase penduduk yang mendapatkan jaminan kesehatan menuju UHC, penurunan rasio kematian bayi. Namun demikian, yang masih menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan adalah bagaimana meningkatkan status akreditasi fasilitas Kesehatan di Kabupaten Mamuju karena kualitas pelayanan harus tetap dipertahankan bahkan harus lebih baik lagi.
 - b. Meningkatnya ketersediaan farmasi, alat Kesehatan di fasilitas kesehatan yang ditunjukkan dengan adanya peningkatan ketersediaan obat esensial di puskesmas, jumlah sarana dan prasarana seperti alat kesehatan, alat kedokteran yang semakin meningkat di puskesmas
 - c. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat pada bidang kesehatan.
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut

Untuk menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah maka Sekretariat, bidang-bidang dan seluruh staf Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju secara bersama-sama mempunyai kewajiban melaksanakan Renja Perubahan Tahun 2025 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya serta menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2025.

Kebijakan yang diambil untuk mengatasi faktor tersebut di atas adalah:

- a. Penyesuaian target sesuai dengan tahapan perencanaan selain fokus pada kebutuhan penanganan stunting juga fokus untuk pelaksanaan SPM dan dukungan kegiatan terhadap ketercapaian IKU Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju

-
- b. Mengoptimalkan program dan kegiatan dengan sumber daya yang ada dan dukungan pendanaan lain seperti APBN, DBH, dan lainnya untuk mendukung kegiatan yang belum terbiayai APBD
 - c. Monitoring dan evaluasi secara intensif dalam rangka pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam pencapaian target yang telah ditentukan.
 - d. Meningkatkan koordinasi dengan lintas sektor dalam rangka percepatan program dan kegiatan dalam pencapaian target
 - e. Kebijakan perencanaan dan penganggaran selain fokus pada kebutuhan penanganan stunting juga fokus untuk pelaksanaan SPM dan dukungan kegiatan terhadap ketercapaian IKU Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju.
 - f. Optimalisasi perencanaan dan penganggaran bersumber dana lain seperti APBN, DBH, dan lainnya untuk mendukung kegiatan yang belum terbiayai APBD.
 - g. Perlu penyesuaian kegiatan, sub kegiatan dan indikatornya sesuai evaluasi terhadap faktor penyebab kegagalan pencapaian target.
 - h. Perlu melihat praktik baik dari kegiatan yang telah berhasil mencapai target yang baik

Tabel T-C.29.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024
Kabupaten Mamuju

Nama Perangkat Daerah : Dinas Kesehatan
dari 18

Lembar 1

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>Outcome</i>)/Kegiatan (<i>Output</i>)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11=(10/4)
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks kualitas Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	100 %	100%
1.02.01.2. 01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	100 %	100%
1.02.01.2.0 1.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	100	3 Dok	10 Dok	100

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>Outcome</i>)/Kegiatan (<i>Output</i>)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realiasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11=(10/4)
1.02.01.2.0 1.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	5 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100	1 Dok	4 Dok	100
1.02.01.2.0 1.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	5 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100	1 Dok	3 Dok	100
1.02.01.2.0 1.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	5 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100	1 Dok	4 Dok	100
1.02.01.2.0 1.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	5 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100	1 Dok	3 Dok	100

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>Outcome</i>)/Kegiatan (<i>Output</i>)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realiasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11=(10/4)
1.02.01.2. 01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10 Lap	0	Lap 0	Lap 0	2	Lap 2	Lap 100	100
1.02.01.2.0 1.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20 Lap	4 Lap	4 Lap	4 Lap	100%	4 Lap	16 Lap	100
1.02.01.2. 02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	100 %	100%
1.02.01.2.0 2.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	582 Ora ng	582 Oran g	582 Oran g/Bulan	582 Oran g	100	568 Oran g/Bulan	568 Orang/ Bulan	100

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>Outcome</i>)/Kegiatan (<i>Output</i>)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11=(10/4)
1.02.01.2.0 2.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	8 Dok	8 Dok	8 Dok	8 Dok	100	12 Dok	24 Dok	100
1.02.01.2.0 2.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			0 Lap	0 Lap	0	1 Lap	0 Lap	0
1.02.01.2.0 2.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	12 Lap	12 Lap	12 0	12 0	100	0 0	0 0	0
1.02.01.2. 03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	100 %	100%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>Outcome</i>)/Kegiatan (<i>Output</i>)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11=(10/4)
1.02.01.2.0 3.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	60 Lap	12 Lap	12 Lap	12 Lap	100	12 Lap	24 Lap	100
1.02.01.2. 05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kepegawaian	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	100 %	100%
1.02.01.2.0 5.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	5 Dok		4 Dok	4 Dok	100	4 Dok	4 Dok	100
1.02.01.2.0 5.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dok	2 Dok	12 Dok	12 Dok	100	12 Dok	20 Dok	100
1.02.01.2. 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase dokumen administrasi Umum Perangkat	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	100 %	100%
1.02.01.2.0 6.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	115 Pak et	23 Pake t	2 Paket	2 Paket	100	2 Paket	48 Paket	100
1.02.01.2.0 6.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	65 Pak et	11 Pake t	10 Paket	10 Paket	100	10 Paket	47 Paket	100

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>Outcome</i>)/Kegiatan (<i>Output</i>)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11=(10/4)
1.02.01.2.0 6.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	30 Pak et	9 Pake t	9 Paket	9 Paket	100	3 Paket	27 Paket	100
1.02.01.2.0 6.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	15 Pak et	7 Pake t	4 Paket	4 Paket	100	4 Paket	17 Paket	100
1.02.01.2.0 6.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	60 Lap	9 Lap	12 Lap	12 Lap	100	12 Lap	21 Lap	100
1.02.01.2.0 6.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	756 Lap	189 Lap	189 Lap	189 Lap	100	189 Lap	404 Lap	100
1.02.01.2. 07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase dokumen administrasi Pengadaan barang milik daerah	100 %		100 %	100 %	100	0	100	%
1.02.01.2.0 7.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	100			
1.02.01.2.0 7.09.	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	100			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>Outcome</i>)/Kegiatan (<i>Output</i>)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11=(10/4)
1.02.01.2.0 7.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	14 Unit		14 Unit	14 Unit	100			
1.02.01.2. 08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase dokumen administrasi Pengadaan barang milik daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	100 %	100%
1.02.01.2.0 8.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Lap	12 Lap	3 Lap	3 Lap	100	3 Lap	42 Lap	100
1.02X.01.2. 08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Lap	12 Lap	12 Lap	12 Lap	100	12 Lap	54 Lap	100
1.02.01.2. 09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang dipelihara	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	100 %	100%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>Outcome</i>)/Kegiatan (<i>Output</i>)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realiasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11=(10/4)
1.02.01.2.0 9.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100	1 Unit	3 Unit	100
1.02.01.2.0 9.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	55 Unit	46 Unit	43 Unit	43 Unit	100	29 Unit	135 Unit	100
1.02.01.2.0 9.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	34 Unit	57 Unit	50 Unit	25 Unit	50	53 Unit	158 Unit	100
1.02.01.2. 10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Peningkatan Pelayanan BLUD	100 %		0 %	0 %	0 100 %		50 %	50
1.02.01.2.1 0.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	23 Unit Kerja		0 Unit Kerja	0 Lap	0 23 Unit Kerja		23 Unit Kerja	100

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>Outcome</i>)/Kegiatan (<i>Output</i>)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11=(10/4)
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Penduduk yang Mengakses	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	100 %	100%
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Fasilitas Kesehatan Sesuai Standar	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	100 %	100%
1.02.02.2.01.02	Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	5 Unit		1 Unit	0 Unit	0	1 Unit	0 Unit	0
1.02.02.2.01.03	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	5 Unit	3 Unit	1 Unit	1 Unit	100	1 Unit	4 Unit	100
1.02.02.2.01.0006	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	5 Unit		0 Unit	0 Unit	0	2 Unit	1 Unit	50

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>Outcome</i>)/Kegiatan (<i>Output</i>)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11=(10/4)
1.02.02.2.0 1.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	7 Unit		0 Unit	0 Unit	0	3 Unit	3 Unit	100
1.02.02.2.0 1.10	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	80 Unit	12 Unit	5 Unit	5 Unit	100	12 Unit	5 Unit	41,67
1.02.02.2.0 1.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan	5 Unit		0 Unit	0 Unit	0	1 Unit	0 Unit	0
1.02.02.2.0 1.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	182 Unit	7 Unit	53 Unit	53 Unit	100	31 Unit	71 Unit	100

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>Outcome</i>)/Kegiatan (<i>Output</i>)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11=(10/4)
1.02.02.2.0 1.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	55 Unit	70 Unit	708 Unit	708 Unit	100	389 Unit	796 Unit	100
1.02.02.2.0 1.0023.	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	730 Pak et	195 Pake t	146 Paket	146 Paket	100	9 Paket	146 Paket	100
1.02.02.2.0 1.26	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman yang Didistribusikan ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	730 Pak et	106 Pake t	147 Paket	147 Paket	100	9 Paket	150 Paket	100
1.02.02.2. 02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Keluarga Sehat	100 %	100 %	100 %	100 %	100% 100 %	100 %	100 %	100%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>Outcome</i>)/Kegiatan (<i>Output</i>)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11=(10/4)
1.02.02.2.0 2.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5.68 8 Ora ng	4.633 Oran g	5883 Oran g	4957 Oran g	84,26	5696 Oran g	5844 Orang	102,60
1.02.02.2.0 2.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5.54 2 Ora ng	5.069 Oran g	5616 Oran g	4612 Oran g	82,12	5696 Oran g	5521 Orang	96,93
1.02.02.2.0 2.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5.49 3 Ora ng	5.052 Oran g	5582 Oran g	3334 0	59,73	5696 Oran g	4214 Orang	73,98
1.02.02.2.0 2.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	16.3 61 Ora ng	18.09 2 Oran g	0 Oran g	0 0	0	2448 2 Oran g	22839 Orang	93,29
1.02.02.2.0 2.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	45.7 17 Ora ng	40.06 6 Oran g	1142 9 Oran g	6286 Oran g	55	1814 18 Oran g	49541 Orang	27,31

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>Outcome</i>)/Kegiatan (<i>Output</i>)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11=(10/4)
1.02.02.2.0 2.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	222.0635 Orang	142.968 Orang	0 Orang	0 0	0	181418 Orang	146418 Orang	80,71
1.02.02.2.0 2.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	14.888 Orang	15.884 Orang	0 Orang	0 0	0	17863 Orang	20133 Orang	100
1.02.02.2.0 2.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	15.168 Orang	11.841 Orang	0 Orang	0 0	0	12702 Orang	14840 Orang	100
1.02.02.2.0 2.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2.305 Orang	1.503 Orang	576 Orang	576 Orang	100	1274 Orang	2930 Orang	100
1.02.02.2.0 2.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan	573 Orang	623 Orang	0 Orang	0 0	0	576 Orang	277 Orang	48,09

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>Outcome</i>)/Kegiatan (<i>Output</i>)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11=(10/4)
		Jiwa Berat Sesuai Standar								
1.02.02.2.0 2.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	5.14 1 Oran g	5.211 Oran g	5886 Oran g	2192 Oran g	37,24	5886 Oran g	8618 Orang	100
1.02.02.2.0 2.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	11.0 13 Oran g	6.573 Oran g	2747 Oran g	2927 Oran g	106,55	7243 Oran g	10639 Orang	100
1.02.02.2.0 2.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	25 Dok	24 Dok	25 Dok	25 Dok	100	2 Dok	61 Dok	100
1.02.02.2.0 2.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	25 Dok	6 Dok	0 Dok	0 0	0	4 Dok	15 Dok	100
1.02.02.2.0 2.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	40 Dok	4 Dok	25 Dok	25 Dok	100	6 Dok	43 Dok	100

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>Outcome</i>)/Kegiatan (<i>Output</i>)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11=(10/4)
1.02.02.2.0 2.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	15 Dok		8 Dok	8 Dok	100	6 Dok	17 Dok	100
1.02.02.2.0 2.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	24 Dok	5 Dok	25 Dok	25 Dok	100	2 Dok	31 Dok	100
1.02.02.2.0 2.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	573 Ora ng	573 Oran g	573 Oran g	573 Oran g	100	573 Oran g	850 Orang	100
1.02.02.2.0 2.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	75 Dok	10 Dok	28 Dok	28 Dok	100	1 Dok	70 Dok	100
1.02.02.2.0 2.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	23 Dok	23 Dok	23 Dok	23 Dok	100	3 Dok	99 Dok	100
1.02.02.2.0 2.28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	95 Pak et	20 Pake t	26 Paket	26 Paket	100	184 Paket	75 Paket	40,76

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>Outcome</i>)/Kegiatan (<i>Output</i>)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11=(10/4)
1.02.02.2.0 2.29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	1 Dok		1 Dok	1 Dok	100	1 Dok	1 Dok	100
1.02.02.2.0 2.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	23 Dok	23 Dok	23 Dok	23 Dok	100	23 Dok	114 Dok	100
1.02.02.2.0 2.34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	5 Dok	1 Dok	25 Dok	25 Dok	100	1 Dok	27 Dok	100
1.02.02.2.0 2.35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	25 Unit	9 Dok	9 Unit	9 Unit	100	23 Unit	22 Unit	100
1.02.02.2.0 2.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	24 Lap	25 Lap	24 Lap	24 Lap	100	0 Lap	49 Lap	100
1.02.02.2.0 2.37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini	5 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100	1 Dok	4 Dok	100

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>Outcome</i>)/Kegiatan (<i>Output</i>)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11=(10/4)
		dan Respon Wabah								
1.02.02.2.0 2.38	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah <i>Public Safety Center</i> (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	5 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100	1 Unit	2 Unit	100
1.02.02.2.0 2.40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	terlaksananya Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	6.559 Orang	6559 Orang	1090 Orang	99 Orang	9,08	1090 Orang	121 Orang	11,10
1.02.02.2.0 2.41	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	terlaksananya Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	22 Orang	22 Orang	22 Orang	22 Orang	100	22 Orang	44 Orang	100
1.02.02.2.0 2.42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	terlaksananya Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	22 Orang	22 Orang	22 Orang	22 Orang	100	2159 Orang	44 Orang	2,03798054 7
1.02.02.2.0 2.0044.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan	24 Dok		24 Dokumen	24 Dok	100	2 Dokumen	24 Dokumen	100

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>Outcome</i>)/Kegiatan (<i>Output</i>)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realiasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11=(10/4)
		reproduksi								
1.02.02.2.0 2.0045.	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota	1 Dok		1 Doku men	1 Dok	100	1 Doku men	1 Dokum en	100
1.02.02.2.0 2.0046.	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	26 Dok		26 Doku men	26 Dok	100	26 Doku men	26 Dokum en	100
1.02.02.2. 03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Pesentase FASYANKES yang menggunakan Sistem Informasi Puskesmas (SIMPUS)	100 %	100 %	100 %	100 %	100% 100 %	100 %	100%	
1.02.02.2.0 3.02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	25 Dok	2 Dok	25 Dok	8 Dok	32	24 Dok	10 Dok	41,67
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Fasyankes terpenuhi SDMK sesuai Standar	100 %	100 %	100 %	100 %	100% 100 %	100 %	100%	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>Outcome</i>)/Kegiatan (<i>Output</i>)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11=(10/4)
1.02.03.2. 02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang memiliki standar tenaga minimal	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	100 %	100%
1.02.03.2.0 2.01	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1 Dok		1 Dok	1 Dok	100	23 Dok	1 Dok	4,35
1.02.03.2.0 2.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	45 Ora ng	50 Oran g	50 Oran g	50 Oran g	100	50 Oran g	45 Orang	90
1.02.03.2.0 2.03	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	11 Dok		11 Dok	11 Dok	100	2 Dok	12 Dok	100

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>Outcome</i>)/Kegiatan (<i>Output</i>)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11=(10/4)
1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase SDM Kesehatan yang terlatih	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	100 %	100%
1.02.03.2.03.01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	582 Orang	88 Orang	361 Orang	133 Orang	36,84	23 Orang	121 Orang	100
1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Fasilitas Penunjang Kesehatan Sesuai Standar	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	100 %	100%
1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang memiliki Izin	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	100 %	100%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>Outcome</i>)/Kegiatan (<i>Output</i>)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realiasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11=(10/4)
1.02.04.2.0 1.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	1 Dok	Dok	1 Dok	1 Dok	100	1 Dok	2 Dok	100
1.02.04.2. 03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Persentase Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	100 %	100 %	100 %	100 %	100% 100 %	100 %	100%	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>Outcome</i>)/Kegiatan (<i>Output</i>)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realiasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11=(10/4)
1.02.04.2.0 3.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	100 Dok	60 Dok	20 Dok	20 Dok	100	20 Dok	97 Dok	485
1.02.04.2. 06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Persentase Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	100 %	100 %	100 %	100 %	100% 100 %	100 %	100%	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>Outcome</i>)/Kegiatan (<i>Output</i>)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11=(10/4)
1.02.04.2.0 6.01	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan <i>Post Market</i> dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	130 Unit	1 Dok	22 Unit	22 Dok	100	22 Unit	33 Unit	100
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Fasyankes yang Melaksanakan Integrasi Layanan Primer (ILP)	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	100 %	100%
1.02.05.2. 01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Desa yang Melaksanakan GERMAS (ASEK)	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	100 %	100%
1.02.05.2.0 1.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	10 Dok	26 Dok	1 Dok	1 Dok	100	1 Dok	27 Dok	100

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>Outcome</i>)/Kegiatan (<i>Output</i>)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realiasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11=(10/4)
1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Proporsi Keluarga dengan Indeks Keluarga Sehat (IKS) Berkategori Sehat	100 %		0 %	0 %	0	100 %	60 %	60
1.02.05.2.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	15 Dok		0 Dok	0 Dok	0	1 Dok	13 Dok	1300
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Posyandu Yang melaksanakan ILP	100 %	100 %	100 %	100 %	%	100 %	100 %	100
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	26 Dok	26 Dok	24 Dok	24 Dok	100	2 Dok	51 Dok	2550

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah/Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju berkomitmen untuk melaksanakan Program dan Kegiatan yang mengacu pada pencapaian SPM dan IKK. Capaian Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju dapat dilihat pada tabel TC.30 berikut :

Tabel T-C.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kesehatan
Kabupaten Mamuju 2023-2026

No	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
				thn(n-2)	thn (n-1)	thn (n)	thn(n+1)	thn(n-2)	thn(n-1)	thn(n)	thn(n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	100%		100%	100%	100%	100%	81,34	95,26	100%	100%	
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	100%		100%	100%	100%	100%	88,99	95,63	100%	100%	
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	100%		100%	100%	100%	100%	88,69	98,56	100%	100%	
4	Pelayanan Kesehatan Balita	100%		100%	100%	100%	100%	56,61	81,27	100%	100%	
5	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	100%		100%	100%	100%	100%	84,93	100	100%	100%	
6	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	100%		100%	100%	100%	100%	78,81	84,92	100%	100%	

No	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
				thn(n-2)	thn (n-1)	thn (n)	thn(n+1)	thn(n-2)	thn(n-1)	thn(n)	thn(n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
7	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	100%		100%	100%	100%	100%	88,92	90,84	100%	100%	
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	100%		100%	100%	100%	100%	100	99,69	100%	100%	
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	100%		100%	100%	100%	100%	100	100	100%	100%	
10	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	100%		100%	100%	100%	100%	82,3	89,39	100%	100%	
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	100%		100%	100%	100%	100%	100	100	100%	100%	
12	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human	100%		100%	100%	100%	100%	90,75	95,61	100%	100%	

No	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
				thn(n-2)	thn (n-1)	thn (n)	thn(n+1)	thn(n-2)	thn(n-1)	thn(n)	thn(n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Immunodeficiency Virus)											
13	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan		6896	5883	5883	6896	6896	15.884	4.423	6896	6896	
14	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan		6896	5616	5616	6896	6896	12.355	4.440	6896	6896	
15	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan		6896	5582	5582	6896	6896	1.274	4.570	6896	6896	
16	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan		18455	23791	23791	18455	18455	465	21.003	18455	18455	
18	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan		181418	173926	173926	181418	181418	15.884	155.175	181418	181418	

No	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
				thn(n-2)	thn (n-1)	thn (n)	thn(n+1)	thn(n-2)	thn(n-1)	thn(n)	thn(n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
19	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan		17863	17491	17491	17863	17863	15.884	15.929	17863	17863	
20	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan		12355	11869	11869	12355	12355	12.355	13.008	12355	12355	
21	Jumlah Warga Negara penderita diabetes mellitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan Kesehatan		1275	1225	1225	1275	1275	1.274	2.817	1275	1275	
22	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan		565	558	558	565	565	465	497	565	565	

No	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
				thn(n-2)	thn (n-1)	thn (n)	thn(n+1)	thn(n-2)	thn(n-1)	thn(n)	thn(n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
23	Jumlah Warga Negara terduga tuberculosi yang mendapatkan pelayanan kesehatan		5886	5125	5125	5886	5886	5.886	4.755	5886	5886	
24	Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan pelayanan Kesehatan		7243	6835	6835	7243	7243	6.573	6.279	7243	7243	

Berdasarkan hasil analisis *fishbone* yang dilakukan, berikut faktor-faktor penyebab tidak tercapainya kinerja pelayanan pada tahun 2023 sebagai berikut:

1. Manusia

- a. Adanya beban ganda bagi beberapa pemegang program seperti pelaksana Penyakit Tidak Menular, Nutrisi, dan Tenaga penyuluh di beberapa puskesmas karena jumlah tenaga yang masih kurang.
- b. Tenaga Dokter/Dokter Gigi yang belum tersedia di beberapa Puskesmas mengakibatkan adanya pelayanan kesehatan yang tidak sesuai standar seperti pelayanan usia pendidikan dasar
- c. Kesadaran masyarakat yang masih kurang untuk melakukan pemeriksaan kesehatan rutin disarana pelayanan kesehatan seperti Puskesmas, Pustu, Poskesdes dan UKBM (Posyandu, Posbindu).
- d. Pengobatan yang tidak sesuai standar/tidak rutin karena masih kurangnya kepatuhan dan pendampingan minum obat khususnya bagi penderita PTM (Hipertensi dan ODGJ Berat)

2. Metode

- a. Pengumpulan Data
 - Masih adanya masyarakat yang mendapatkan pelayanan kesehatan belum memiliki Nomor Induk Kependudukan sehingga datanya tidak bisa dimasukkan dalam Rekap format pelaporan melalui aplikasi.
 - Masih adanya data pelayanan kesehatan di Rumah Sakit, Klinik kesehatan, dan tempat praktek Dokter swasta yang belum terkumpul.
- b. Penghitungan kebutuhan
 - Penghitungan kebutuhan belum memfokuskan pada pemenuhan semua standar pelayanan yang ada di setiap indikator Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.
 - Belum optimalnya koordinasi lintas sektor dan lintas program dalam pemenuhan barang dan jasa sesuai standar dalam penyelenggaraan SPM BK.
- c. Belum optimalnya koordinasi dan kerjasama lintas sektor khususnya pemerintah desa/kelurahan dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan.

3. Material

- a. Penentuan jumlah sasaran menggunakan data riil untuk semua indikator SPM BK yang belum bisa terealisasi menjadi salah satu penyebab tidak tercapainya target Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (100%).
- b. Masih minimnya kegiatan sosialisasi, pelatihan dan monev pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan mengakibatkan belum meratanya pemahaman Definisi Operasional dan penyelenggaraan SPM BK sesuai Permenkes No.4 tahun 2019 oleh pelaksana program.

4. Anggaran

- a. Belum semua Puskesmas melaksanakan perencanaan dan penganggaran dengan melakukan identifikasi masalah berdasarkan skala prioritas isu permasalahan yang harus diselesaikan, misalnya menggunakan metode *Urgency, Seriousness, Growth* (USG)
- b. Alokasi anggaran di sektor kesehatan belum mampu mengakomodir semua sub indikator Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.
- c. Support penganggaran yang bersumber dari DAU masih sangat terbatas.

5. Sarana dan Prasarana

- a. Ketersediaan Alat dan bahan sesuai standar pelaksanaan pelayanan SPM BK yang belum cukup seperti (ODGJ Kit) dan Bahan dukung pelayanan kesehatan lainnya (Media KIE, rapor kesehatan anak sekolah, Buku kesehatan lansia, Strip pemeriksaan kolesterol). Masih adanya beberapa daerah sulit, jauh dari fasilitas pelayanan kesehatan mengakibatkan masyarakat belum bisa mendapatkan pelayanan sesuai standar, seperti pelayanan Ibu hamil yang minimal 4 kali selama masa kehamilan, persalinan yang di luar fasilitas kesehatan karena keterlambatan mengakses fasilitas pelayanan kesehatan/puskesmas.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Pada tahun 2023, Adanya perubahan kebijakan nasional berkaitan dengan perencanaan dan penganggaran, yang berdampak pada pencapaian target-target pembangunan kesehatan di Kabupaten Mamuju sehingga perlu dilakukan penyesuaian target dan indikator pada Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju yang merujuk pada kebijakan-kebijakan pembangunan terkait penanganan rehabilitasi pasca gempa dan upaya untuk

pemulihannya. Dengan memperhatikan capaian dan analisis hasil evaluasi Renstra serta mempertimbangan isu strategis dengan memetakan 6 (enam) permasalahan utama bidang kesehatan berdasarkan pengelompokan komponen dari Sistem Kesehatan Daerah (SKD) yang akan dilakukan penanganannya sampai dengan tahun 2025, yaitu:

1. Belum optimalnya upaya kesehatan yang dilakukan baik upaya kesehatan perorangan maupun upaya kesehatan masyarakat;
2. Belum optimalnya pembiayaan kesehatan;
3. Belum terpenuhinya SDM Kesehatan di fasilitas kesehatan sesuai standar;
4. Belum terpenuhinya sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan/minuman;
5. Belum optimalnya pengelolaan manajemen data dan informasi kesehatan serta regulasi kesehatan; dan
6. Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan.

Dalam pelaksanaan kinerja program dan kegiatan tahun 2024, Dinas Kesehatan banyak melakukan koordinasi bersama Lintas Sektor dan Puskesmas karena sebagian besar program dan kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan merupakan bentuk pembinaan dan pendampingan serta fasilitasi kepada Puskesmas dan Jaringanannya sehingga diharapkan ketercapaian kinerja Dinas Kesehatan mendukung ketercapaian target pembangunan Pemerintah Kabupaten Mamuju. Begitu pula dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi Sulawesi Barat, Dinas Kesehatan senantiasa berkoordinasi terutama dalam rangka pelaksanaan kegiatan bersumber APBN baik DAK fisik maupun non fisik. Keberhasilan capaian indikator kinerja Dinas Kesehatan pada tahun 2024, tentu saja akan berimplikasi terhadap pencapaian visi dan misi 'Mamuju Keren' dalam tercapainya sasaran strategis misi 3 yaitu Mewujudkan Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Sosial. Hal ini terlihat dari ketercapaian.

Indikator daerah bidang kesehatan yaitu Angka Kematian Ibu (AKI) pada tahun 2024 dengan realisasi 194/100.000 KH dari Target 192/100.000 KH atau mencapai 101,04%. Indeks Keluarga Sehat (IKS) dengan realisasi 31% dari target 20% atau mencapai 129%. Begitupun Prevalensi Stunting dengan realisasi 30,90% dari target 19,00% atau mencapai 162,63%. Bagi Dinas Kesehatan untuk melakukan Kerjasama dalam mengatasi permasalahan Kesehatan lainnya yang memerlukan dukungan lintas sektor.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Pada tahap awal proses penyusunan rencana kerja, Dinas Kesehatan melakukan review terhadap rancangan awal RKPD harus memastikan bahwa RKPD memfasilitasi kebutuhan Dinas Kesehatan di tahun 2025.

Rancangan awal Rencana Kerja Dinas Kesehatan diperoleh berdasar hasil usulan dari Puskesmas dan bidang-bidang yang ada di Dinas Kesehatan. Usulan kegiatan dari luar Dinas Kesehatan diperoleh dari hasil Musrenbang Kecamatan, Musrenbang Kabupaten, Reses Dewan, dan Forum Perangkat Daerah.

Proses penyampaian usulan kegiatan dan program tersebut dilaksanakan dengan maksud bisa dilakukan perencanaan dengan sistem *bottom up* baik dari Puskesmas maupun dari masyarakat langsung, sehingga perencanaan tidak dilakukan sentralistik di kabupaten.

Hasil usulan kemudian ditentukan skala prioritasnya berdasarkan ketersediaan pagu anggaran dan juga pada kegiatan yang mengarah pada pencapaian tujuan pembangunan kesehatan yang akan dicapai tanpa meninggalkan pencapaian indikator yang tertuang dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta Renstra Dinas Kesehatan.

Setelah melalui pembahasan yang intensif dan rasionalisasi program untuk mencapai efektifitas dan efisiensi yang optimal, maka Rencana Kerja Dinas Kesehatan dengan pagu indikatif sejumlah Rp. Rp. 206.381.448.611,- disesuaikan dengan pagu indikatif (Seratus Sembilan Puluh Tiga Milyar Lima Ratus Tiga Belas Juta Seratus Enam Belas Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah). Selengkapnya ditampilkan dalam tabel TC-31 berikut:

Tabel T-C.31
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
Kabupaten Mamuju

Nama Perangkat Daerah : Dinas Kesehatan

N O	Rancangan Awal RKPD Perubahan Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				206.381.448.611	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				206.381.448.611
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				206.381.448.611	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				206.381.448.611
I	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA		Persentase Penduduk yang Mengakses Layanan Kesehatan	100 Persen	110.285.355.514	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGA N DAN		Persentase Penduduk yang Mengakses Layanan Kesehatan	100 Persen	110.285.355.514

	KESEHATAN MASYARAKAT					UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				
I. 1	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Fasilitas Kesehatan Sesuai Standar	100 Persen	43.800.184.005	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Fasilitas Kesehatan Sesuai Standar	100 Persen	43.800.184.005
1	Pembangunan Puskesmas	Mamuju	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	1 Unit	2.209.303.100	Pembangunan Puskesmas	Mamuju	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	1 Unit	2.209.303.100

2	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Mamuju	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	1 Unit	15.001.105.968	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Mamuju	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	1 Unit	15.001.105.968
3	Pengembangan Puskesmas	Mamuju	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	2 Unit	3.782.456.700	Pengembangan Puskesmas	Mamuju	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	2 Unit	3.782.456.700
4	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Mamuju	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	3 Unit	552.456.700	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Mamuju	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	3 Unit	552.456.700

5	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Mamuju	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	15 Unit	2.666.602.840	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Mamuju	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	15 Unit	2.666.602.840
6	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Mamuju	Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan	1 Unit	300.408.700	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Mamuju	Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan	1 Unit	300.408.700
7	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Mamuju	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	31 Unit	11.631.984.000	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Mamuju	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	31 Unit	11.631.984.000

8	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Mamuju	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	389 Unit	283.823.000	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Mamuju	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	389 Unit	283.823.000
9	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Mamuju	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	9 Paket	7.258.207.497	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Mamuju	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	9 Paket	7.258.207.497
10	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Mamuju	Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	9 Paket	113.835.500	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas	Mamuju	Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	9 Paket	113.835.500

						Kesehatan				
I. 2	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Keluarga Sehat	45 persen	66.400.931.109	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Keluarga Sehat	45 persen	66.400.931.109
1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Mamuju	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5696 Orang	2.280.241.751	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Mamuju	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5696 Orang	2.280.241.751

2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Mamuju	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5696 Orang	184.110.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Mamuju	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5696 Orang	184.110.000
3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Mamuju	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5696 Orang	27.321.200	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Mamuju	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5696 Orang	27.321.200
4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Mamuju	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	24482 Orang	104.822.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Mamuju	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	24482 Orang	104.822.000
5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Mamuju	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	181418 Orang	1.638.351.732	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Mamuju	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai	181418 Orang	1.638.351.732

								Standar		
6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Mam uju	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	181418 Orang	61.564.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Mam uju	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	181418 Orang	61.564.000
7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Mam uju	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	17863 Orang	698.137.698	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Mam uju	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	17863 Orang	698.137.698
8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Mam uju	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1235 Orang	16.002.400	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Mam uju	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1235 Orang	16.002.400

9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Mamuju	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1274 Orang	24.451.600	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Mamuju	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1274 Orang	24.451.600
10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Mamuju	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	143 Orang	461.025.300	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Mamuju	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	143 Orang	461.025.300
11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Mamuju	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	5886 Orang	573.522.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Mamuju	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	5886 Orang	573.522.000
12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan	Mamuju	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang	7243 Orang	75.700.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan	Mamuju	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang	7243 Orang	75.700.000

	Risiko Terinfeksi HIV		Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			Risiko Terinfeksi HIV		Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		
1 3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Mam uju	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	2 Dokume n	5.548.634.624	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Mam uju	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	2 Dokume n	5.548.634.6 24
1 4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Mam uju	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	4 Dokume n	443.359.600	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Mam uju	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	4 Dokume n	443.359.600
1 5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Mam uju	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	6 Dokume n	499.630.276	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Mam uju	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	6 Dokume n	499.630.276
1 6	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Mam uju	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	6 Dokume n	434.961.800	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Mam uju	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi	6 Dokume n	434.961.800

								Kesehatan		
1 7	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Mam uju	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	2 Dokume n	1.219.567.897	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Mam uju	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	2 Dokume n	1.219.567.8 97
1 8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Mam uju	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	573 Orang	245.680.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Mam uju	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	573 Orang	245.680.000

19	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Mamuju	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	3.301.496.217	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Mamuju	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	3.301.496.217
20	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Mamuju	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	3 Dokumen	41.100.132.400	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Mamuju	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	3 Dokumen	41.100.132.400
21	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Mamuju	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	184 Paket	92.852.200	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Mamuju	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	184 Paket	92.852.200

2 2	Penyelenggaraa n Kabupaten/Kot a Sehat	Mam uju	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraa n Kabupaten/Kot a Sehat	1 Dokume n	54.497.600	Penyelenggara an Kabupaten/K ota Sehat	Mam uju	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggara an Kabupaten/Ko ta Sehat	1 Dokume n	54.497.600
2 3	Operasional Pelayanan Puskesmas	Mam uju	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	23 Dokume n	4.949.099.448	Operasional Pelayanan Puskesmas	Mam uju	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	23 Dokume n	4.949.099.4 48
2 4	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Mam uju	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 Dokume n	394.217.600	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Mam uju	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 Dokume n	394.217.600

25	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Mamuju	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	23 Unit	72.870.000	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Mamuju	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	23 Unit	72.870.000
26	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Mamuju	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	1 Dokumen	150.000.000	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Mamuju	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	1 Dokumen	150.000.000
27	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Mamuju	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan	1 Unit	377.194.000	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Mamuju	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem	1 Unit	377.194.000

			Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)					Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)		
28	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Mamuju	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1090 Orang	8.079.600	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Mamuju	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1090 Orang	8.079.600
29	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Mamuju	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	22 Orang	13.633.600	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Mamuju	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	22 Orang	13.633.600
30	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Mamuju	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	2159 Orang	67.974.810	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Mamuju	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	2159 Orang	67.974.810

3 1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Mam uju	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	2 Dokume n	827.679.310	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Mam uju	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	2 Dokume n	827.679.310
3 2	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kot a	Mam uju	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kot a	1 Dokume n	199.090.600	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/K ota	Mam uju	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Ko ta	1 Dokume n	199.090.600
3 3	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Mam uju	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	26 Dokume n	255.029.846	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Mam uju	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	26 Dokume n	255.029.846
1. 3	Penyelenggara an Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi		Pesentase FASYANKES yang menggunakan Sistem Informasi Puskesmas (SIMPUS)	100 Persen	84.240.400	Penyelenggar aan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi		Pesentase FASYANKES yang menggunakan Sistem Informasi Puskesmas (SIMPUS)	100 Persen	84.240.400

1	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Mamuju	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	24 Dokumen	84.240.400	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Mamuju	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	24 Dokumen	84.240.400
II	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		Persentase Fasyankes terpenuhi SDMK sesuai Standar	80 Persen	3.313.144.839	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		Persentase Fasyankes terpenuhi SDMK sesuai Standar	80 Persen	3.313.144.839
II. 1	Perencanaan Kebutuhan dan Pendaayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota		Persentase Puskesmas yang memiliki standar tenaga minimal	92 Persen	2.103.997.439	Perencanaan Kebutuhan dan Pendaayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota		Persentase Puskesmas yang memiliki standar tenaga minimal	92 Persen	2.103.997.439
1	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan	Mamuju	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi	23 Dokumen	87.025.300	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan	Mamuju	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan	23 Dokumen	87.025.300

	Sumber Daya Manusia Kesehatan		serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan			Sumber Daya Manusia Kesehatan		dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan		
2	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Mamuju	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	50 Orang	1.897.531.600	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Mamuju	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	50 Orang	1.897.531.600
3	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Mamuju	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	2 Dokumen	119.440.539	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Mamuju	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	2 Dokumen	119.440.539

II. 2	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase SDM yang terlatih	63 Persen	1.209.147.400	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase SDM yang terlatih	63 Persen	1.209.147.400
1	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Mamuju	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	23 Orang	1.209.147.400	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Mamuju	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	23 Orang	1.209.147.400

Iii	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN		Persentase Fasilitas Penunjang Kesehatan Sesuai Standar	100 Persen	331.362.000	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN		Persentase Fasilitas Penunjang Kesehatan Sesuai Standar	100 Persen	331.362.00 0
III . 1	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)		Persentase Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang memiliki Izin	100 Persen	77.865.000	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)		Persentase Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang memiliki Izin	100 Persen	77.865.000

1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Mamuju	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	1 Dokumen	77.865.000	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Mamuju	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	1 Dokumen	77.865.000
III 2	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman		Persentase Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman	100 Persen 100 Persen	193.034.000	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan		Persentase Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan	100 Persen 100 Persen	193.034.000

	Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga		Tertentu yang dapat diproduksi oleh Industri Rumah Tangga Persentase Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan P-IRT yang tersertifikat			Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga		Minuman Tertentu yang dapat diproduksi oleh Industri Rumah Tangga Persentase Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan P-IRT yang tersertifikat		
1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman	Mamuju	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk	20 Dokumen	193.034.000	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan	Mamuju	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi,	20 Dokumen	193.034.000

	Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga		Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga			Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga		untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga		
III . 3	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga		Persentase pemeriksaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan pos market pada produksi dan produk makanan minuman industri rumah tangga	65 Persen	60.463.000	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga		Persentase pemeriksaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan pos market pada produksi dan produk makanan minuman industri rumah tangga	65 Persen	60.463.000

1	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Mamuju	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	22 Unit	60.463.000	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Mamuju	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	22 Unit	60.463.000
IV	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		Persentase Fasyankes yang Melaksanakan Integrasi Layanan Primer (ILP)	100 Persen	778.934.591	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		Persentase Fasyankes yang Melaksanakan Integrasi Layanan Primer (ILP)	100 Persen	778.934.591
IV . 1	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah		Persentase Desa yang Melaksanakan GERMAS (ASEK)	60 Persen	115.903.000	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat		Persentase Desa yang Melaksanakan GERMAS (ASEK)	60 Persen	115.903.000

	Kabupaten/Kota					Daerah Kabupaten/Kota				
1	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Mamuju	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1 Dokumen	115.903.000	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Mamuju	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1 Dokumen	115.903.000
IV . 2	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Desa yang Melaksanakan GERMAS (ASEK)	60 Persen	37.124.000	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Desa yang Melaksanakan GERMAS (ASEK)	60 Persen	37.124.000

1	Penyelenggaraa n Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Mam uju	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraa n Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	1 Dokume n	37.124.000	Penyelenggara an Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Mam uju	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggara an Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	1 Dokume n	37.124.000
IV . 3	Pengembanga n dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Ko ta		Persentase Posyandu Yang melaksanakan ILP	60 Persen	625.907.591	Pengembang an dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/K ota		Persentase Posyandu Yang melaksanakan ILP	60 Persen	625.907.59 1
1	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya	Mam uju	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat	2 Dokume n	625.907.591	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembanga n dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya	Mam uju	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya	2 Dokume n	625.907.591

	Masyarakat (UKBM)		(UKBM)			Masyarakat (UKBM)		Masyarakat (UKBM)		
V	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		Indeks kualitas Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	91.672.651.667	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA		Indeks kualitas Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	91.672.651.667
V. 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 Persen	45.877.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 Persen	45.877.000
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Mamuju	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	6.811.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Mamuju	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	6.811.000
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Mamuju	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil	1 Dokumen	8.770.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen	Mamuju	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan	1 Dokumen	8.770.000

			Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD			RKA-SKPD		Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Mam uju	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokume n	8.516.800	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Mam uju	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokume n	8.516.800
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Mam uju	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	1 Dokume n	8.256.800	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Mam uju	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokume n	8.256.800
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Mam uju	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	1 Dokume n	5.123.200	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Mam uju	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	1 Dokume n	5.123.200

			Dokumen Perubahan DPA-SKPD					Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Mam uju	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	1.690.400	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Mam uju	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	1.690.400
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Mam uju	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	6.708.800	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Mam uju	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	6.708.800
V. 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase dokumen administrasi Keuangan	100 Persen	60.988.420.055	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase dokumen administrasi Keuangan	100 Persen	60.988.420.055

			Perangkat Daerah					Perangkat Daerah		
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Mamuju	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	568 Orang/bulan	60.876.535.325	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Mamuju	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	568 Orang/bulan	60.876.535.325
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Mamuju	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	107.940.730	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Mamuju	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	107.940.730
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Mamuju	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	3.944.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Mamuju	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	3.944.000

V. 3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase dokumen administrasi Pengadaan barang milik daerah	100 Persen	9.276.800	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase dokumen administrasi Pengadaan barang milik daerah	100 Persen	9.276.800
1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Mamuju	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	9.276.800	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Mamuju	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	9.276.800
V. 4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Ketersediaan Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Berkualitas	100 Persen	12.399.591	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Ketersediaan Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Berkualitas	100 Persen	12.399.591
1	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Mamuju	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4 Dokumen	5.644.191	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Mamuju	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4 Dokumen	5.644.191
2	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Mamuju	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen	6.755.400	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Mamuju	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja	12 Dokumen	6.755.400

								Pegawai		
V. 5	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	40.602.370	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	40.602.370
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Mamuju	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	-	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Mamuju	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	-
2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Mamuju	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10 Paket	1.303.400	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Mamuju	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10 Paket	1.303.400
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Mamuju	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	7.058.400	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Mamuju	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	7.058.400

4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Mamuju	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	2.656.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Mamuju	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	2.656.000
5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Mamuju	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1.412.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Mamuju	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1.412.000
6	Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Mamuju	Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	28.172.570	Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Mamuju	Jumlah Laporan Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	28.172.570
V. 6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan		Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan	100 Persen	275.157.820	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintaha		Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan	100 Persen	275.157.820

	Daerah		Pemerintah Daerah			n Daerah		Pemerintah Daerah		
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Mamuju	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	237.957.820	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Mamuju	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	237.957.820
V. 7	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Mamuju	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	37.200.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Mamuju	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	37.200.000
1	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase barang milik Daerah yang dipelihara	100 Persen	40.507.600	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase barang milik Daerah yang dipelihara	100 Persen	40.507.600

2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Mamuju	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	9.307.600	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Mamuju	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	9.307.600
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Mamuju	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	29 Unit	23.400.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Mamuju	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	29 Unit	23.400.000
4	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Mamuju	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	18 Unit	7.800.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Mamuju	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	18 Unit	7.800.000
V. 7	Peningkatan Pelayanan BLUD		Persentase Pelayanan BLUD	100 Persen	30.260.410.431	Peningkatan Pelayanan BLUD		Persentase Pelayanan BLUD	100 Persen	30.260.410.431

1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Mam uju	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	23 Unit Kerja	30.260.410.431	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Mam uju	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	23 Unit Kerja	30.260.410.431
					206.381.448.611					206.381.448.611

2.5. Penelaahan Usulan program dan Kegiatan Masyarakat

Program dan kegiatan usulan pemangku kepentingan sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 merupakan suatu hasil kajian yang diusulkan pemangku kepentingan sebagai bagian dari pendekatan perencanaan menggunakan sistem perencanaan bawah atas (*bottom-up planning*) berdasarkan asas demokratisasi dan desentralisasi, baik dari kelompok masyarakat, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi Kecamatan/Desa maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah Kabupaten dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan Musrenbang Kecamatan/Desa yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah. Untuk selanjutnya dilakukan penelaahan kesesuaian usulan dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dan mengakomodasi usulan yang sesuai dengan program dan kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah.

Dinas Kesehatan selaku Perangkat daerah yang memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat menerima berbagai usulan dari masyarakat dalam bentuk Pembangunan/rehabilitasi Puskesmas dan Jaringannya, pembiayaan kesehatan, pengadaan alat kesehatan, penguatan kapasitas sumberdaya manusia, dan lain sebagainya. Melalui forum perangkat daerah, Bappepan memfasilitasi Kecamatan/Desa untuk menyampaikan kebutuhannya untuk kemudian dilakukan verifikasi oleh bidang pengampu yang ada di Dinas Kesehatan Mamuju. Hasil kesepakatan telah dikoordinasikan bersama Bappepan dan diinput ke dalam SIPD. Sebagian besar usulan yang masuk melalui aplikasi SIPD, sudah memenuhi persyaratan administrasi yang harus dilengkapi, namun masih banyak pula usulan yang lampiran persyaratannya tidak lengkap bahkan tidak mendukung terhadap usulan yang diajukan. Berikut usulan yang ditujukan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju yang sudah diinput di dalam aplikasi SIPD :

Tabel T-C.32
Usulan Program Dan Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025
Kabupaten Mamuju

Nama Perangkat Daerah : Dinas Kesehatan

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
I	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				
I.1	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				
I.1.a	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas				
	Rehab Rawat Inap Puskesmas Tommo	Desa Tommo Kec. Tommo	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas/Pustu	1 Unit	Musrenbang
I.1.b	Pengembangan Puskesmas				
	Pembangunan Penambahan Ruang inap Pasien, Puskesmas Beru-Beru	Desa Beru-Beru	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	1 Unit	Musrenbang
I.1.c	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya				
	Rehabilitasi Pustu	Kec. Sampaga	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 Unit	Musrenbang
I.1.d	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan				
	Pengadaan Ambulance	Kec. Tapalang Barat	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	1 Unit	Musrenbang

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan (ayat (2) Pasal 2), dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (Kabupaten/Kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Sementara itu Paralel dengan pembuatan RKPD, sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki Renja-SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra-SKPD dan mengacu kepada RKPD, memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Dengan mengacu pada Undang-Undang tersebut, maka mekanisme perencanaan pembangunan daerah ke depan juga dituntut untuk semakin mengedepankan pendekatan perencanaan pembangunan partisipatif. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah disusun dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah. Perencanaan pembangunan daerah dimaksud disusun oleh pemerintahan daerah sesuai dengan kewenangannya yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Penyusunan perencanaan pembangunan daerah juga dimaksudkan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), telah merubah pola perencanaan yang ada dari *shopping list* ke *working plan*. Dimana satuan kerja perangkat daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu

indikatif dan perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses *bottom up* dan *top down*. Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat sehingga penyelenggaraan pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Mekanisme Musrenbang sebagai saluran formal bagi masyarakat untuk berpartisipasi.

Pembangunan kesehatan pada hakekatnya adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen Bangsa Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis.

Dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah tetap berpedoman pada RENSTRA Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 Sesuai Edaran Menteri PPN/Bappenas Nomor B.899/M.PPN/Ses/PP.03.02/12/2019, tanggal 20 Desember 2019 dengan Visi “Terwujudnya Masyarakat Sehat, Produktif, Mandiri dan Berkeadilan untuk Menuju Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Misi Kemenkes :

1. Memperkuat upaya kesehatan yang bermutu dan menjangkau seluruh penduduk Indonesia
2. Memberdayakan masyarakat dan mengarusutamakan pembangunan kesehatan
3. Meningkatkan ketersediaan, pemerataan dan mutu sumber daya kesehatan
4. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan inovatif.

Pemerintah Kabinet Indonesia Maju telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Bidang Kesehatan Tahun 2020-2024 yakni meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta melalui penguatan pelayanan kesehatan dasar (*Primary Health Care*) dengan mendorong peningkatan upaya promotif dan preventif, didukung inovasi dan pemanfaatan teknologi. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia juga telah menetapkan lima fokus strategi pembangunan kesehatan untuk 5 (lima) tahun ke depan, yaitu kesehatan

ibu dan anak, kesehatan reproduksi, perbaikan gizi masyarakat, pencegahan dan penguatan sistem kesehatan serta pengawasan obat dan makanan.

Selain itu, dengan adanya transformasi sistem kesehatan dengan 6 pilar transformasi kesehatan Indonesia yang terdiri atas:

1. Transformasi Layanan Primer adalah mengintegrasikan layanan kesehatan Primer sesuai siklus hidup manusia melalui upaya Promotif dan Preventif, yang terdiri atas
 - Edukasi Penduduk melalui 7 kampanye utama (Imunisasi, gizi seimbang, olah raga, anti rokok, sanitasi dan kebersihan lingkungan, skrining penyakit, dan kepatuhan pengobatan)
 - Pencegahan Primer melalui penambahan imunisasi rutin menjadi 14 antigen dan perluasan cakupan di seluruh Indonesia
 - Pencegahan Sekunder melalui skrining 14 penyakit penyebab kematian tertinggi di tiap sasaran usia, skrining stunting, dan peningkatan ANC untuk kesehatan ibu dan bayi
 - Peningkatan Kapasitas dan kapabilitas layanan primer melalui pembangunan puskesmas di 171 kecamatan, penyediaan 40 obat esensial, pemenuhan SDM Kesehatan Primer
2. Transformasi Layanan Rujukan dengan meningkatkan akses dan mutu layanan sekunder dan tersier melalui pembangunan rumah sakit di kawasan timur, jejaring pengampuan 6 layanan unggulan, kemitraan dengan world's top healthcare centres.
3. Transformasi Sistem Ketahanan Kesehatan dengan meningkatkan ketahanan sektor farmasi dan alat kesehatan melalui produksi dalam negeri 14 vaksin rutin, top 10 obat, top 10 alkes by volume dan by value, memperkuat ketahanan tanggap darurat melalui jejaring nasional berbasis lab, tenaga cadangan tanggap darurat dan kesiapsiagaan krisis
4. Transformasi Sistem Pembiayaan Kesehatan melalui regulasi pembiayaan kesehatan dengan 3 tujuan, tersedia, cukup, dan berkelanjutan, alokasi yang adil, dan pemanfaatan yang efektif dan efisien
5. Transformasi SDM Kesehatan melalui penambahan kuota mahasiswa, beasiswa dalam dan luar negeri, kemudahan penyetaraan nakes lulusan luar negeri
6. Transformasi Teknologi Kesehatan melalui pengembangan dan pemerataan teknologi, dan bioteknologi sektor kesehatan

-
7. Peningkatan kesehatan ibu, anak, keluarga berencana (KB) dan kesehatan reproduksi, mencakup :
- a. Peningkatan pelayanan maternal dan neonatal berkesinambungan di fasilitas publik dan swasta dengan mendorong seluruh persalinan di fasilitas kesehatan, peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan antenatal dan neonatal, peningkatan kompetensi tenaga kesehatan, perbaikan sistem rujukan maternal yang didukung dengan peningkatan kapasitas sistem kesehatan dan penguatan regulasi, penyediaan sarana prasarana dan farmasi, jaminan ketersediaan darah setiap saat, dan pencatatan kematian ibu di fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. Perluasan dan pengembangan imunisasi dasar lengkap;
 - c. Peningkatan gizi remaja putri dan ibu hamil; dan
 - d. Perluasan akses dan kualitas pelayanan KB serta kesehatan reproduksi sesuai karakteristik wilayah yang didukung oleh optimalisasi peran sektor swasta dan pemerintah daerah dengan advokasi, komunikasi, informasi, edukasi (KIE) dan konseling; peningkatan kompetensi Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) dan Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB), tenaga lini lapangan, dan tenaga kesehatan dalam pelayanan KB; penguatan fasilitas pelayanan kesehatan, jaringan dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan serta upaya kesehatan bersumber daya masyarakat; dan peningkatan KB pasca persalinan; dan
 - e. Peningkatan pengetahuan, pemahaman dan akses layanan kesehatan reproduksi remaja secara lintas sektor yang responsif gender.
8. Percepatan perbaikan gizi masyarakat untuk pencegahan dan penanggulangan permasalahan gizi ganda, mencakup :
- a. Penguatan komitmen, kampanye, pemantauan dan evaluasi upaya perbaikan gizi masyarakat;
 - b. Pengembangan sistem jaminan gizi dan tumbuh kembang anak dengan pemberian jaminan asupan gizi sejak dalam kandungan, perbaikan pola asuh keluarga, dan perbaikan fasilitas air bersih dan sanitasi lingkungan;
 - c. Percepatan penurunan stunting dengan peningkatan efektivitas intervensi spesifik, perluasan dan penajaman intervensi sensitif secara terintegrasi;

-
- d. Peningkatan intervensi yang bersifat life saving dengan didukung bukti (*evidence based policy*) termasuk fortifikasi pangan;
 - e. Penguatan advokasi, komunikasi sosial dan perubahan perilaku hidup sehat terutama mendorong pemenuhan gizi seimbang berbasis konsumsi pangan (*food based approach*);
 - f. Penguatan sistem surveilans gizi;
 - g. Peningkatan komitmen dan pendampingan bagi daerah dalam intervensi perbaikan gizi dengan strategi sesuai kondisi setempat; dan
 - h. Respon cepat perbaikan gizi dalam kondisi darurat
9. Peningkatan pengendalian penyakit, dengan perhatian khusus pada HIV/AIDS, TB, malaria, jantung, stroke, hipertensi, diabetes, kanker, *emerging diseases*, penyakit yang berpotensi menimbulkan kejadian luar biasa, penyakit tropis terabaikan (kusta, filariasis, schistosomiasis), gangguan jiwa, cedera, gangguan penglihatan, dan penyakit gigi dan mulut, mencakup :
- a. Pencegahan dan pengendalian faktor risiko penyakit termasuk perluasan cakupan deteksi dini, penguatan *surveilans real time*, pengendalian vektor dan perluasan layanan berhenti merokok.
 - b. Penguatan *health security* terutama peningkatan kapasitas untuk pencegahan, deteksi, dan respon cepat terhadap ancaman penyakit termasuk penguatan *alert system* kejadian luar biasa dan karantina kesehatan.
 - c. Peningkatan cakupan penemuan kasus dan pengobatan serta penguatan tata laksana penanganan penyakit dan cedera.
 - d. Pengendalian resistensi antimikroba.
 - e. Penguatan sanitasi total berbasis masyarakat.
10. Pembudayaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas), mencakup:
- a. Pengembangan kawasan sehat antara lain kabupaten/kota sehat, pasar sehat, Upaya Kesehatan Sekolah (UKS) dan lingkungan kerja sehat;
 - b. Penyediaan lingkungan yang mendorong aktivitas fisik seperti penyediaan ruang terbuka publik, transportasi masal dan konektivitas antarmoda, lingkungan sehat, dan penurunan polusi udara.
 - c. Regulasi yang mendorong pemerintah pusat dan daerah serta swasta

untuk menerapkan pembangunan berwawasan kesehatan dan mendorong hidup sehat termasuk pengembangan standar dan pedoman untuk sektor non kesehatan, peningkatan harga dan cukai rokok secara bertahap dengan mitigasi dampak bagi petani tembakau dan pekerja industri hasil tembakau, pelarangan total iklan dan promosi rokok, perbesaran pencantuman peringatan bergambar bahaya merokok, dan perluasan pengenaan cukai pada produk pangan yang berisiko tinggi terhadap kesehatan dan pengaturan produk makanan dengan kandungan gula, garam dan lemak.

- d. Promosi perubahan perilaku hidup sehat yang inovatif, pemberdayaan masyarakat dan penggerakan masyarakat madani untuk hidup sehat.
- e. Peningkatan penyediaan pilihan pangan sehat termasuk penerapan label pangan dan perluasan akses terhadap buah dan sayur.

11. Penguatan sistem kesehatan dan pengawasan obat dan makanan, mencakup:

- a. Penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan.
- b. Pemenuhan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan.
- c. Pemenuhan dan peningkatan daya saing sediaan farmasi dan alat kesehatan.
- d. Peningkatan efektivitas pengawasan obat dan makanan.
- e. Penguatan tata kelola, pembiayaan, penelitian dan pengembangan kesehatan.

Tantangan yang dihadapi dalam pembangunan kesehatan baik di tingkat nasional maupun dalam lingkup wilayah propinsi Sulawesi Barat Khususnya di Kabupaten Mamuju yaitu kondisi geografis yang berupa wilayah pegunungan adalah tantangan dalam mewujudkan aksesibilitas terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas pada masyarakat di wilayah tersebut. Masyarakat di wilayah tersebut selain menghadapi akses pelayanan kesehatan yang rendah juga masih kurang dalam penerapan perilaku hidup bersih dan sehat sehingga rentan terhadap penyakit dan kekurangan gizi.

Masyarakat masih ditempatkan sebagai obyek dalam pembangunan kesehatan, promosi kesehatan belum banyak merubah perilaku masyarakat menjadi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Pemanfaatan dan kualitas Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM), seperti Posyandu

dan Poskesdes masih rendah. Demikian pula keterlibatan sektor lain dalam pembangunan kesehatan. Hingga saat ini, seluruh unsur yang terlibat dalam sektor kesehatan telah berupaya dalam peningkatan kesehatan masyarakat namun masalah kesehatan tidak menjadi tanggung jawab tunggal sektor kesehatan, banyak sektor lain yang diperlukan keterlibatannya untuk ikut menjaga dan mewujudkan derajat kesehatan yang optimal antara lain sektor pendidikan, agama, pertanian/ketahanan pangan, lingkungan hidup, PU dan tata ruang/pemukiman, perikanan dan kelautan, peternakan dan sektor lainnya.

Tantangan lainnya yang harus dihadapi dalam pelayanan kesehatan adalah masih kurangnya sumber daya kesehatan (sumber daya manusia, peralatan, sarana prasarana dan pembiayaan), terbatasnya kemampuan manajemen kesehatan dan sinkronisasi perencanaan kebijakan, program dan anggaran yang bertumpu pada sistem informasi kesehatan.

Adapun peluang yang dapat mendukung pelayanan kesehatan antara lain diterapkannya Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) atau Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sejak tanggal 1 Januari 2014. Dengan diberlakukannya JKN, maka sistem pemeliharaan kesehatan masyarakat akan tertata dengan baik, aspek promotif-preventif-kuratif dan rehabilitatif mendapatkan porsi yang seimbang dan akan terlaksana dengan optimal, tenaga kesehatan akan termanfaatkan dengan baik pada aspek promotif – preventif - kuratif dan rehabilitatif dan seluruh masyarakat akan terlayani dengan baik.

Dengan diberlakukannya JKN ini jelas menuntut diberlakukannya peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan, baik pada fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama maupun fasilitas kesehatan tingkat lanjutan serta perbaikan sistem rujukan pelayanan kesehatan.

Sejak Berlakunya Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada bulan Januari 2014 maka setiap desa akan mendapat dana alokasi yang cukup besar setiap tahunnya. Kucuran dana desa tersebut akan sangat berarti bagi pemberdayaan masyarakat desa. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan Pengembangan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) akan lebih mungkin diupayakan di tingkat rumah tangga desa, karena cukup tersedianya sarana-sarana yang menjadi faktor pemungkinnya (*enabling factors*).

Adanya SPM atau Standar Pelayanan Minimal bidang kesehatan sesuai

Permenkes Nomor 6 Tahun 2024 dan pembinaan pencapaian SPM oleh Pemerintah juga menjadi peluang untuk meningkatkan akses pelayanan kesehatan masyarakat.

Perkembangan teknologi dan informasi dewasa ini juga memberikan peluang terhadap peningkatan dan kemudahan dalam pemberian pelayanan kesehatan secara langsung maupun tidak langsung.

Peluang lainnya adalah adanya dukungan pengembangan sumber daya kesehatan (sumber daya manusia, peralatan, sarana prasarana dan pembiayaan) dari pemerintah daerah, provinsi, maupun dari pemerintah pusat.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Pada Dokumen RPJMD Kabupaten Mamuju Tahun 2025-2029 disebutkan bahwa “Mewujudkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan bidang pendidikan, kesehatan dan sosial” (Misi 3) dan Meningkatkan Kualitas Sumber daya manusia dan Kesejahteraan Masyarakat” (Tujuan 2). Untuk bisa menjadi berdaya saing maka Bupati Mamuju menetapkan sasaran yang akan dicapai yaitu “Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat”

Berdasarkan sasaran diatas maka Dinas Kesehatan telah merumuskan tujuan dan sasaran pembangunan Kesehatan di Kabupaten Mamuju antara lain :

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran
Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju Tahun 2025-2029

TUJUAN/SASARAN PD		INDIKATOR KINERJA PD	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE				
			2025	2026	2027	2028	2029
Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat		Usia Harapan Hidup	72.49	72.86	73.22	73.58	73.94
I	Meningkatnya Status Gizi, Kesehatan Ibu dan Anak	Angka Kematian Ibu	194/100.000 KH	193/100.000 KH	192/100.000 KH	191/100.000 KH	190/100.000 KH
		Angka Kematian Balita	11.5/1.000 KH	11.4/1.000 KH	11.3/1.000 KH	11.2/1.000 KH	11.1/1.000 KH
		Prevalensi Stunting	29.43	27.96	26.49	25.02	23.55
II	Meningkatnya upaya pencegahan Pengendalian penyakit dan Penuntasan Kasus TB	Angka Kesakitan (Morbiditas)	12.10	12	11.71	11.42	11.13
		Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage)	90	90	90	90	90
III	Meningkatnya akses Layanan dan Perlindungan Jaminan Kesehatan	Persentase Masyarakat yang memiliki Jaminan Kesehatan	90.52	90.81	91.1	91.39	91.68

TUJUAN/SASARAN PD		INDIKATOR KINERJA PD	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE				
			2025	2026	2027	2028	2029
		Persentase fasyankes yang terakreditasi paripurna	21.74	21.74	21.74	34.78	43.47
III	Terselenggaranya Birokrasi Dinas Kesehatan yang Efektif, Efisien dan Berorientasi pada Pelayanan Prima	Predikat AKIP	BB	BB	BB	BB	A

1.3. Program dan Kegiatan

Dalam rangka mendukung tujuan dan sasaran program pembangunan kesehatan, Penyusunan program dan kegiatan OPD Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 18 Tahun 2020, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, Visi Misi Bupati Mamuju, Program Prioritas Nasional dan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju Tahun 2025-2029. Berdasarkan hal tersebut telah ditetapkan beberapa program dan kegiatan yang menjadi prioritas ditahun 2025 yang difokuskan untuk pencapaian target kinerja:

1. Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinkes Kabupaten Mamuju
2. Peningkatan pelayanan kesehatan di wilayah-wilayah daerah DTPK (daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan).

Berikut program prioritas di tahun 2025:

1. Penguatan Sistem Kesehatan Daerah
2. Pelaksanaan SPM Kabupaten dan Puskesmas
3. Penanganan Kasus Stunting
4. Pembiayaan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin
5. Pemenuhan sarana prasarana, SDM, alat kesehatan, obat, vaksin, dan bahan habis pakai, serta akreditasi puskesmas
6. Insentif bagi tenaga Kesehatan
7. Program AIDS, TBC dan Malaria (ATM)

Dalam penyusunan Renja Perubahan Tahun 2025, Sasaran Program sebanyak 5 (lima) Program, 21 Kegiatan, 91 Sub Kegiatan yang meliputi : (1) Program penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, 8 Kegiatan, 44 Sub Kegiatan (2) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan

Perorangan dan Upaya Kesehatan masyarakat, 3 Kegiatan, 61 Sub Kegiatan (3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan, 3 Kegiatan, 6 Sub Kegiatan (4) Program Peningkatan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, makanan minuman, 4 Kegiatan, 8 Sub Kegiatan (5) Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan, 3 Kegiatan, 3 Sub Kegiatan

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan tersebut selain dikelola oleh Dinas Kesehatan juga dikelola di Puskesmas pada sub Kegiatan Operasional Pelayanan Puskesmas dan Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

PERANGKAT DAERAH

Secara umum, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel T-C.33
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025
dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Kabupaten Mamuju

Nama Perangkat Daerah : Dinas Kesehatan

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Rancangan Perubahan Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				206.381.44 8.611				227.019.59 3.472
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				206.381.44 8.611				227.019.59 3.472
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN	Persentase Penduduk yang Mengakses Layanan Kesehatan		100 Persen	110.285.35 5.514			100 Persen	121.313.89 1.065

	UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT								
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Fasilitas Kesehatan Sesuai Standar		100 Persen	43.800.184.005			100 Persen	48.180.202.406
1.02.02.2.01.0002	Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	2.209.303.100	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN, PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK		1 Unit	2.430.233.410

1.02.02.2.01.0003	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	15.001.105.968	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN, DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN-PENGUATAN SISTEM KESEHATAN		1 Unit	16.501.216.565
1.02.02.2.01.0006	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Unit	3.782.456.700	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN, DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN-PENGUATAN SISTEM KESEHATAN		2 Unit	4.160.702.370

1.02.02.2.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Unit	552.456.700	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK		3 Unit	607.702.370
1.02.02.2.01.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15 Unit	2.666.602.840	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN, DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN-PENGUATAN SISTEM KESEHATAN		12 Unit	2.933.263.124
1.02.02.2.01.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	300.408.700	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN		1 Unit	330.449.570

1.02.02.2. 01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	31 Unit	11.631.984.000	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN, DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN-PENGUATAN SISTEM KESEHATAN		31 Unit	12.795.182.400
1.02.02.2. 01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	389 Unit	283.823.000	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEL/KOTA		389 Unit	312.205.300

1.02.02.2. 01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	Kab. Mamuju, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	9 Paket	7.258.207.4 97	DAU YANG DITENTUK AN PENGGUN AANNYA BIDANG KESEHATA N, DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK DINAS- BOK KABUPATE N/KOTA		9 Paket	7.984.028.2 47
1.02.02.2. 01.0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	Kab. Mamuju, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	9 Paket	113.835.50 0	DAU YANG DITENTUK AN PENGGUN AANNYA BIDANG KESEHATA N, DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK DINAS- BOK KABUPATE N/KOTA		9 Paket	125.219.05 0

1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Keluarga Sehat		45 persen	66.400.931.109			45 persen	73.041.024.220
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5696 Orang	2.280.241.751	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		5696 Orang	2.508.265.926
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu yang Bersalin Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5696 Orang	184.110.000	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA		5696 Orang	202.521.000
1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan	5696 Orang	27.321.200	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUN		5696 Orang	30.053.320

		Kesehatan Sesuai Standar	an, Semua Kel/Desa			AANNYA BIDANG KESEHATAN, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATE N/KOTA			
1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24482 Orang	104.822.000	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK		24482 Orang	115.304.200
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	181418 Orang	1.638.351.732	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		181418 Orang	1.802.186.905

1.02.02.2. 02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	181418 Orang	61.564.000	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN		181418 Orang	67.720.400
1.02.02.2. 02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17863 Orang	698.137.698	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		17863 Orang	767.951.468
1.02.02.2. 02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1235 Orang	16.002.400	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN		1235 Orang	17.602.640
1.02.02.2. 02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan	Kab. Mamuju, Semua	1274 Orang	24.451.600	DAU YANG DITENTUKAN		1274 Orang	26.896.760

	Penderita Diabetes Melitus	Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan, Semua Kel/Desa			PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN			
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	143 Orang	461.025.300	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		143 Orang	507.127.830
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5886 Orang	573.522.000	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		5886 Orang	630.874.200

1.02.02.2. 02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7243 Orang	75.700.000	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN		7243 Orang	83.270.000
1.02.02.2. 02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Gizi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Gizi	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	5.548.634.624	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		2 Dokumen	6.103.498.086
1.02.02.2. 02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Dokumen	443.359.600	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK		4 Dokumen	487.695.560

						DINAS- BOK KABUPATE N/KOTA, DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMA S			
1.02.02.2. 02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Kab. Mamuju, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	6 Dokum en	499.630.27 6	DAU YANG DITENTUK AN PENGGUN AANNYA BIDANG KESEHATA N, DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK DINAS- BOK KABUPATE N/KOTA, DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMA S		6 Dokum en	549.593.30 4

1.02.02.2. 02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Kab. Mamuju, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	6 Dokum en	434.961.80 0	DAU YANG DITENTUK AN PENGGUN AANNYA BIDANG KESEHATA N, DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK DINAS- BOK KABUPATE N/KOTA		6 Dokum en	478.457.98 0
1.02.02.2. 02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Kab. Mamuju, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	2 Dokum en	1.219.567.8 97	DAU YANG DITENTUK AN PENGGUN AANNYA BIDANG KESEHATA N, DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK DINAS- BOK KABUPATE N/KOTA, DAK NON FISIK-		2 Dokum en	1.341.524.6 87

						DANA BOK-BOK PUSKESMA S			
1.02.02.2. 02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Kab. Mamuju, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	573 Orang	245.680.00 0	DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMA S		573 Orang	270.248.00 0
1.02.02.2. 02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Kab. Mamuju, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	1 Dokum en	3.301.496.2 17	DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMA S		1 Dokum en	3.631.645.8 39
1.02.02.2. 02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Kab. Mamuju, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	3 Dokum en	41.100.132. 400	PAJAK DAERAH, RETRIBUSI JASA UMUM, SISA LEBIH PERHITUN GAN ANGGARA N TAHUN SEBELUM NYA, DANA BAGI		3 Dokum en	45.210.145. 640

						HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUK AN PENGGUN AANNYA BIDANG KESEHATA N, PENDAPAT AN BAGI HASIL PAJAK ROKOK			
1.02.02.2. 02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	Kab. Mamuju, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	184 Paket	92.852.200	DAU YANG DITENTUK AN PENGGUN AANNYA BIDANG KESEHATA N, DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK DINAS- BOK		184 Paket	102.137.42 0

						KABUPATE N/KOTA			
1.02.02.2. 02.0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Kab. Mamuju, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	1 Dokum en	54.497.600	DAU YANG DITENTUK AN PENGGUN AANNYA BIDANG KESEHATA N		1 Dokum en	59.947.360
1.02.02.2. 02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Kab. Mamuju, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	23 Dokum en	4.949.099.4 48	DAU YANG DITENTUK AN PENGGUN AANNYA BIDANG KESEHATA N, DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMA S		23 Dokum en	5.444.009.3 93
1.02.02.2. 02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kab. Mamuju, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	1 Dokum en	394.217.60 0	DAU YANG DITENTUK AN PENGGUN AANNYA BIDANG KESEHATA		1 Dokum en	433.639.36 0

						N, DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK DINAS- BOK KABUPATE N/KOTA			
1.02.02.2. 02.0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	Kab. Mamuju, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	23 Unit	72.870.000	DAU YANG DITENTUK AN PENGGUN AANNYA BIDANG KESEHATA N		23 Unit	80.157.000
1.02.02.2. 02.0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Kab. Mamuju, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	1 Dokum en	150.000.00 0	PENDAPAT AN BAGI HASIL PAJAK ROKOK		1 Dokum en	165.000.00 0
1.02.02.2. 02.0038	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu	Kab. Mamuju, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	1 Unit	377.194.00 0	DAU YANG DITENTUK AN PENGGUN AANNYA BIDANG KESEHATA N		1 Unit	414.913.40 0

		(SPGDT)							
1.02.02.2. 02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1090 Orang	8.079.600	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN		1090 Orang	8.887.560
1.02.02.2. 02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	22 Orang	13.633.600	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN		22 Orang	14.996.960
1.02.02.2. 02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2159 Orang	67.974.810	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMA		2159 Orang	74.772.291

						S			
1.02.02.2. 02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	827.679.310	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		2 Dokumen	910.447.241
1.02.02.2. 02.0045	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	199.090.600	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK		1 Dokumen	218.999.660
1.02.02.2. 02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	26 Dokumen	255.029.846	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN, DAK NON FISIK-		26 Dokumen	280.532.831

						DANA BOK-BOK DINAS- BOK KABUPATE N/KOTA, DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMA S			
1.02.02.2 .03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Pesentase FASYANKES yang menggunakan Sistem Informasi Puskesmas (SIMPUS)		100 Persen	84.240.400			100 Persen	92.664.440
1.02.02.2. 03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Kab. Mamuju, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	24 Dokum en	84.240.400	DAU YANG DITENTUK AN PENGGUN AANNYA BIDANG KESEHATA N		24 Dokum en	92.664.440
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Fasyankes terpenuhi SDMK sesuai Standar		80 Persen	3.313.144. 839			80 Persen	3.644.459. 323

1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang memiliki standar tenaga minimal		92 Persen	2.103.997.439			92 Persen	2.314.397.183
1.02.03.2.02.0001	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	23 Dokumen	87.025.300	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN		23 Dokumen	95.727.830
1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50 Orang	1.897.531.600	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN		50 Orang	2.087.284.760
1.02.03.2.02.0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	119.440.539	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN		2 Dokumen	131.384.593

						N			
1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase SDM yang terlatih		63 Persen	1.209.147.400			63 Persen	1.330.062.140
1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	23 Orang	1.209.147.400	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA		23 Orang	1.330.062.140
1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN	Persentase Fasilitas Penunjang Kesehatan Sesuai Standar		100 Persen	331.362.000			100 Persen	364.498.200

	MINUMAN								
1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang memiliki Izin		100 Persen	77.865.000			100 Persen	85.651.500
1.02.04.2.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	77.865.000	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN		1 Dokumen	85.651.500
1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh	Persentase Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat		100 Persen 100 Persen	193.034.000			100 Persen 100 Persen	212.337.400

	Industri Rumah Tangga	Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga Persentase Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan P-IRT yang tersertifikat							
1.02.04.2. 03.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20 Dokumen	193.034.000	DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK DINAS- BOK PENGAWA SAN OBAT DAN MAKANAN		20 Dokumen	212.337.400
1.02.04.2 .06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan	Persentase pemeriksaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan pos market pada produksi dan		65 Persen	60.463.000			65 Persen	66.509.300

	Minuman Industri Rumah Tangga	produk makanan minuman industri rumah tangga							
1.02.04.2.06.0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	22 Unit	60.463.000	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN		22 Unit	66.509.300
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Fasyankes yang Melaksanakan Integrasi Layanan Primer (ILP)		100 Persen	778.934.591			100 Persen	856.828.050
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Desa yang Melaksanakan GERMAS (ASEK)		60 Persen	115.903.000			60 Persen	127.493.300
1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	115.903.000	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA		1 Dokumen	127.493.300

	Masyarakat	Masyarakat	Semua Kel/Desa			BIDANG KESEHATAN			
1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Desa yang Melaksanakan GERMAS (ASEK)		60 Persen	37.124.000			60 Persen	40.836.400
1.02.05.2.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	37.124.000	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN		1 Dokumen	40.836.400
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Posyandu Yang melaksanakan ILP		60 Persen	625.907.591			60 Persen	688.498.350

1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	625.907.591	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		2 Dokumen	688.498.350
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks kualitas Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 Persen	91.672.651.667			100 Persen	100.839.916.834
1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan dokumen perencanaan,		100 Persen	45.877.000			100 Persen	50.464.700

		penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah							
1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	6.811.000	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)		2 Dokumen	7.492.100
1.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	8.770.000	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)		1 Dokumen	9.647.000
1.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	8.516.800	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)		1 Dokumen	9.368.480
1.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	8.256.800	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)		1 Dokumen	9.082.480

1.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	5.123.200	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)		1 Dokumen	5.635.520
1.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Laporan	1.690.400	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)		4 Laporan	1.859.440
1.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Laporan	6.708.800	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)		4 Laporan	7.379.680
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100 Persen	60.988.420.055			100 Persen	67.087.262.061

1.02.01.2. 02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	568 Orang/bulan	60.876.535.325	PAJAK DAERAH, DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN		568 Orang/bulan	66.964.188.858
1.02.01.2. 02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan	Kab. Mamuju,	12 Dokum	107.940.73	PAJAK BAHAN		12 Dokum	118.734.80

	Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	en	0	BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)		en	3
1.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	3.944.000	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)		1 Laporan	4.338.400
1.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase dokumen administrasi Pengadaan barang milik daerah		100 Persen	9.276.800			100 Persen	10.204.480
1.02.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	9.276.800	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)		12 Laporan	10.204.480
1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Berkualitas		100 Persen	12.399.591			100 Persen	13.639.550

1.02.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Dokumen	5.644.191	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)		4 Dokumen	6.208.610
1.02.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	6.755.400	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)		12 Dokumen	7.430.940
1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 Persen	40.602.370			100 Persen	44.662.607
1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Paket	-	RETRIBUSI JASA UMUM		2 Paket	-
1.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua	10 Paket	1.303.400	RETRIBUSI JASA UMUM		10 Paket	1.433.740

			Kel/Desa						
1.02.01.2. 06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Paket	7.058.400	PAJAK DAERAH		3 Paket	7.764.240
1.02.01.2. 06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Paket	2.656.000	RETRIBUSI JASA UMUM		4 Paket	2.921.600
1.02.01.2. 06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	1.412.000	PAJAK DAERAH		1 Laporan	1.553.200
1.02.01.2. 06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Laporan	28.172.570	PAJAK DAERAH		2 Laporan	30.989.827
1.02.01.2	Penyediaan Jasa	Persentase		100				100	

.08	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persen	275.157.820			Persen	302.673.602
1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Laporan	237.957.820	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		3 Laporan	261.753.602
1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	37.200.000	PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN		12 Laporan	40.920.000
1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik Daerah yang dipelihara		100 Persen	40.507.600			100 Persen	44.558.360
1.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	9.307.600	OPSEN PKB		1 Unit	10.238.360

1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	29 Unit	23.400.000	OPSEN PKB		29 Unit	25.740.000
1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	18 Unit	7.800.000	OPSEN PKB		53 Unit	8.580.000
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Pelayanan BLUD		100 Persen	30.260.410.431			100 Persen	33.286.451.474
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	23 Unit Kerja	30.260.410.431	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		23 Unit Kerja	33.286.451.474
					206.381.448.611				227.019.593.472

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

a. Kegiatan :

Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat

Sub Kegiatan :

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

b. Kegiatan :

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi keuangan SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

c. Kegiatan :

Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

d. Kegiatan :

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
- Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai

e. Kegiatan :

Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

-
- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Fasilitas Kunjungan Tamu
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- f. Kegiatan :
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Sub Kegiatan :
- Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - Penyediaan jasa pelayanan Umum Kantor
- g. Kegiatan :
- Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah Daerah
- Sub Kegiatan :
- Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan
 - Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan Dinas Operasional atau lapangan
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya

2. PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

- a. Kegiatan :
- Penyediaan Fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
- Pembangunan Puskesmas
 - Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya
 - Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan
 - Pengembangan Puskesmas
 - Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya
 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas
 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan lainnya
 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan
 - Pengadaan Alat kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
 - Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat penunjang Medik di Fasilitas Kesehatan

- Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan
- Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya

b. Kegiatan :

Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu bersalin
- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
- Pengelolaan Pelayanan kesehatan Lingkungan
- Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
- Pengelolaan Surveilans Kesehatan
- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA
- Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan
- Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
- Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
- Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah
- Pengambilan dan pengiriman Spesimen Penyakit potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional

- Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat
 - Operasional Pelayanan Puskesmas
 - Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya
 - Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota
 - Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah
 - Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)
 - Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis
 - Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)
 - Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria
 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota
 - Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak
- c. Kegiatan :
- Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi
- Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan

3. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

a. Kegiatan :

Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan
- Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar
- Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan

b. Kegiatan :

Pengembangan Mutu dan peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah/Kota

Sub Kegiatan :

- Pengembangan Mutu dan peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah/Kota

4. PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN

a. Kegiatan :

Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)

Sub Kegiatan :

- Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut pengawasan perizinan apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal, usaha mikro obat tradisional (UMOT)

b. Kegiatan :

Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin produksi untuk Produk makanan minuman tertentu yang dapat diproduksi Oleh Industri Rumah tangga.

Sub Kegiatan :

- Pengendalian dan pengawasan serta pengawasan serta tindak lanjut pengawasan sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk produk Makanan Minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh Industri Rumah Tangga

c. Kegiatan :

Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga.

Sub Kegiatan :

- Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan

5. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN

a. Kegiatan :

Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

Sub Kegiatan :

-
- Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat
- b. Kegiatan :
- Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- Sub Kegiatan :
- Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat
- c. Kegiatan :
- Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- Sub Kegiatan :
- Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)

BAB V

P E N U T U P

Sesuai dengan amanat Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka sebagai salah satu pelaku pembangunan kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju telah menyusun Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025.

Rencana Kerja Perubahan ini merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif dan memuat berbagai program pembangunan kesehatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju yang disusun untuk lebih memfokuskan pada penguatan sistem kesehatan di Kabupaten Mamuju dan mempersiapkan menuju era transformasi pelayanan Kesehatan.

Optimalisasi dalam pelaksanaan rencana kerja ini merupakan hal penting yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan kewenangan urusan pembangunan yang diemban oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju sebagai salah satu OPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Mamuju.

Keberhasilan pembangunan kesehatan tidak semata-mata ditentukan oleh hasil kerja keras sektor kesehatan, tetapi sangat dipengaruhi oleh hasil kerja serta kontribusi positif berbagai sektor pembangunan lainnya. Sebagai uraian penutup dari Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju Tahun 2025 dapat kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang pada hakekatnya merupakan rencana capaian kinerja tahunan ini disusun dengan memperhatikan program dan kegiatan dalam Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju serta mengacu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagaimana Nota Kesepakatan antara Bupati Mamuju dengan Pimpinan DPRD Kabupaten Mamuju tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun Anggaran 2025 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun Anggaran 2025.
2. Sesuai dengan RPJMD Kabupaten Mamuju dan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju Tahun 2025 – 2029 maka ditetapkan Rencana Kerja tahunan serta kebijakan/strategi untuk mengerahkan segala potensi dan mengurangi keterbatasan/kendala yang ada dalam mencapai visi dan misi.

Bahwa Program dan Kegiatan yang tertuang pada Renja Perubahan Tahun 2025 ini dititik beratkan pada upaya peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan Kabupaten Mamuju dengan strategi meningkatkan ketersediaan fasilitas kesehatan yang terakreditasi nasional, meningkatkan tingkat kepuasan masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan, meningkatkan jumlah kepesertaan JKN – KIS, Meningkatkan pelayanan pada ibu

hamil, bayi, balita, usia pendidikan dasar, usia produktif dan Usia Lanjut, Meningkatkan kualitas pelayanan pada ibu bersalin, Meningkatkan pelayanan pada 1000 hari pertama kehidupan (HPK) (Program SPM), Meningkatkan pencegahan dan pengendalian penyakit (Program ATM), kewaspadaan dini dan respon wabah dan respon cepat penanggulangan KLB dan krisis kesehatan, meningkatkan lingkungan sehat dan perilaku hidup sehat di masyarakat, Meningkatkan Indeks Keluarga Sehat (PIS-PK), Meningkatkan kualitas pangan olahan yang memenuhi syarat keamanan pangan dan kesehatan, Meningkatkan penyelenggaraan *Good Governance* dengan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas, terukur, dan sesuai peraturan.

Semoga Renja Perubahan Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju tahun 2025 ini dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait, sehingga diharapkan dapat tercapai tujuan pembangunan daerah Kabupaten Mamuju. Akhirnya, ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen ini.